

# IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BARITO UTARA

Muhammad Afifi Mubarak

NPP. 31.0630

Asdaf Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: [muhammadafifi525@gmail.com](mailto:muhammadafifi525@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Sarwani, M.Ag

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** *The Family Hope Program (Program Keluarga Harapan) aims to assist impoverished families by providing them access to healthcare and education, as well as enhancing the quality of life for these families. **Purpose:** This research aims to describe and analyze the supporting and inhibiting factors, as well as efforts to optimize the implementation of the Family Hope Program in North Barito Regency. Employing a descriptive qualitative method, data collection techniques involve interviews, observations, and documentation. **Method:** Data analysis includes data condensation, presentation, and conclusion/verification. **Result:** The research findings indicate that the implementation of the Family Hope Program in North Barito Regency is not yet optimal due to identified implementation constraints, such as the insufficient number of Family Beneficiary Assistants and the lack of improvement in the income of beneficiary families. **Conclusion:** There are supporting factors contributing to the implementation of the Family Hope Program in the field, including public support and community participation in monitoring and reporting on the program's implementation, as well as hierarchical coordination among institutions. Efforts to optimize the implementation of the Family Hope Program in North Barito Regency include intensive training for Program Family Beneficiary Assistants, empowerment of beneficiary families (Keluarga Penerima Manfaat or KPM), and periodic program evaluation and adjustment.*

**Keywords:** *Implementation, Family Hope Program, Poverty*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Program Keluarga Harapan adalah program ujuannya adalah untuk membantu keluarga miskin dengan memberikan mereka akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis factor pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Barito Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Barito Utara belum optimal dengan adanya temuan kendala pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang masih kekurangan jumlah Pendamping Keluarga Penerima Manfaat dan Pendapatan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tidak menunjukkan peningkatan. **Kesimpulan:** Terdapat faktor pendukung yang juga menunjang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lapangan yaitu adanya dukungan publik dan partisipasi Masyarakat dalam ikut serta mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dan keterpaduan hirarki antarlembaga. Upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Barito Utara dilakukan Pelatihan Intensif Bagi Pendamping Program Keluarga Harapan, Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Evaluasi dan Penyesuaian Program secara berkala.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Implementasi kebijakan adalah proses penerjemahan kebijakan dari bentuk tertulis menjadi tindakan nyata. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan, karena menentukan apakah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya atau tidak (Agustino:2016:163). Implementasi kebijakan biasanya dilaksanakan melalui undang-undang, tetapi bisa juga melalui perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan implementasi badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan atau saran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk mengatur proses. Dengan kebijakan publik yang baik, diharapkan seluruh tindakan pemerintahan berlangsung dalam proses yang rasional dan dengan jaminan kemanfaatan yang nyata bagi seluruh warga negara (Hamdi 2014).

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang dihadapi masyarakat di berbagai belahan bumi termasuk Indonesia. Di Indonesia, strategi pengentasan kemiskinan pun telah banyak dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai model kebijakan atau program (Kurniawan 2023). Kabupaten Barito Utara, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, memiliki kondisi demografis yang dinamis dan terus berkembang. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara adalah sekitar 160.235 jiwa. (BPS Kab. Barito Utara, 2023). Untuk meningkatkan efektivitas dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Barito Utara, perlu dilakukan pendataan secara cermat terhadap kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu. Pendataan ini akan memastikan bahwa bantuan melalui program-program bantuan sosial (bansos) dan paya pemberdayaan lainnya, baik yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, maupun pihak ketiga, tepat sasaran dan berdampak signifikan. Program keluarga harapan (PKH) adalah program pemerintah yang merupakan bantuan sosial bersyarat bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat baik pendidikan maupun Kesehatan (Sulkarnain 2021). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program yang secara rutin dilaksanakan Kabupaten Barito Utara untuk mengurangi kemiskinan. Program ini adalah program nasional yang memberikan layanan pendidikan dan kesehatan gratis kepada keluarga sangat miskin (KSM) di Indonesia.

Peserta PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin yang mendapatkan bantuan tunai jika memenuhi kriteria kesehatan dan pendidikan. Program ini tidak hanya membantu peserta mengatasi masalah keuangan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup generasi berikutnya. Kriteria keluarga yang mendapat bantuan PKH adalah mereka yang mempunyai dua anak yang masih sekolah di sekolah dasar dan sekolah lanjut tingkat pertama serta ibu hamil. (Mujiarti Ulfah, dkk:2015:89). Program Keluarga Harapan diluncurkan pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial Indonesia yang bertujuan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Program ini berkembang dari 7 provinsi menjadi 25 provinsi pada 2011, mencakup lebih dari 1,1 juta keluarga, dan terus bertambah hingga 10 juta keluarga pada 2020. Permensos No. 1 Tahun 2018 mengatur Program Keluarga Harapan, menetapkan hak dan 10 kewajiban penerima, serta mekanisme pelaksanaan. Program Keluarga Harapan mendorong perubahan perilaku dan kemandirian, berkontribusi pada penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kemiskinan merupakan satu fenomena yang dialami oleh seseorang individu tanpa kerelaan dan kehendak mereka (Gopal 2021). Kabupaten Barito Utara memiliki tingkat kemiskinan yang terus meningkat dari tahun 2019-2022. Kabupaten Barito Utara mencatatkan penduduk miskin sebesar 6.500 jiwa pada tahun 2018. Sementara itu, (pada tahun 2022 Jumlah penduduk miskin Kabupaten Barito Utara berjumlah 7.700 jiwa, hal ini berarti dalam rentang tahun 2018-2022 jumlah penduduk miskin Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan sebanyak 1.200 jiwa (BPS Kabupaten Barito Utara 2023). Garis kemiskinan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 adalah Rp450.936. Pada tahun 2022 Garis Kemiskinan Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan sebanyak Rp.112.457. Sejalan dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai 7.700 jiwa di tahun 2022, naik 300 jiwa dari penduduk miskin tahun 2021 (7.400 jiwa). Dari keseluruhan data dapat disimpulkan bahwa presentasi kemiskinan di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022 (BPS Kabupaten Barito Utara 2022).

Kebijakan pengentasan kemiskinan meliputi yang bersifat mendadak dan bersifat periodik. Yang bersifat mendadak merupakan kegiatan untuk pertolongan pertama untuk masyarakat miskin agar lebih produktif. Penanggulangan kemiskinan secara periodik dilakukan untuk membentuk mental, perilaku, semangat yang mampu bersaing dalam tantangan global dengan harapan mengurangi jumlah kemiskinan dalam jangka Panjang (Sudarwati 2020). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik di bidang kesehatan maupun Pendidikan (Rusmiyati 2018). Seluruh program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di Masyarakat (Arif 2012). Program PKH di Kabupaten Barito Utara sudah berjalan cukup baik namun faktanya masih saja ditemukan adanya permasalahan di lapangan. Beberapa masalah yang disebutkan seperti kurang tepat sasaran dimana masih adanya keluarga yang harusnya memperoleh bantuan namun belum terdata, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat PKH, pada saat pendataan calon penerima bantuan, status sosial masyarakat adalah mampu.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penelitian tentang kemiskinan dan sosial maupun konteks program dan kebijakan yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan. Penelitian Salasih, S. (2023). *Penerapan Program Keluarga Harapan Dan Dilematika Bagi Pengentasan Kemiskinan Dikelurahan Teluk Nilau*, mengemukakan Program Keluarga Harapan (PKH) menghadapi kendala dalam sering terjadi kartu penerima program keluarga harapan yang keblokir tapi untuk sekrang kendala itu pun sudah hamper tidak pernah terjadi lagi dikarna kan penerima PKH itu sendiri yang mengambil bantuan tersebut dikantor pos atau dibank yang telah ditentukan. Penelitian I Sri Mujiarti Ulfah, S.Sos, M.AP dan Dra. Hj. Puput Ratnasari, M. Hum (2015) *Implementas Program Keluarga Harapan* Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat ketidakseragaman dalam distribusi manfaat program, dimana keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung mendapat keuntungan, sedangkan keluarga yang berada dalam kemiskinan ekstrem sering kali terlewatkan. Selain itu, isu mengenai kriteria kemiskinan yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjadi hambatan yang signifikan dalam implementasi program. Tina Regina Sari (2022) *Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam*. Studi ini mengevaluasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi masalah kemiskinan di Nagari Tiumang selama periode 2016-2020 dan menemukan bahwa program tersebut masih belum mencapai efektivitas yang diharapkan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Roqi Yasin (2021) *Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas*, Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banyumas telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Umum PKH tahun 2020, mulai dari proses pendataan hingga tahap graduasi penerima manfaat. Selain itu, PKH terbukti memberikan efek yang menguntungkan bagi masyarakat setempat.

### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana Penulisan ini berbeda dalam hal teori, lokasi, fokus, dan ruang lingkup penulisan. Penulisan sebelumnya menggunakan teori Keadilan dari Perspektif Islam, sedangkan penulisan ini menggunakan teori Mazmanian dan Sabtier (1980) dengan menggunakan 3 dimensi yaitu Mudah-Tidaknya Masalah Dikendalikan, Kemampuan Kebijakan untuk menstruktur Proses Implementasi dan Variabel Diluar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses (Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino:2008:163), metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) diterapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara. Fokus utama adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi selama implementasi PKH serta untuk mengeksplorasi strategi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mengatasi tantangan tersebut agar program dapat berjalan dengan efektif.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi dari Mazmanian dan Sabtier (1980) dengan menggunakan 3 dimensi yaitu Mudah-Tidaknya Masalah Dikendalikan, Kemampuan Kebijakan untuk menstruktur Proses Implementasi dan Variabel Diluar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses (Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino:2008:163), Pengumpulan data Pemilihan dan penentuan calon partisipan yang berpotensi melibatkan proses pengumpulan data (Nugrahani:2014:108) sehingga aspek penting lainnya adalah mempertimbangkan keterjangkauan dan kemampuan para partisipan untuk secara aktif terlibat dalam penulisan dengan hal tersebut teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Menganalisis data menggunakan *Findings* yaitu upaya untuk menemukan dan menggali tema, pola, konsep, wawasan, dan pemahaman yang muncul dari data. Pada tahap analisis data ini, pengorganisasian bahan hasil wawancara dan observasi dilakukan secara sistematis, diikuti dengan penafsiran untuk menghasilkan pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan baru (Abdussamad:2021:120).

Penulis menggunakan Sumber data Primer dan Sekunder, Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan dan Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain (Nugrahani:2014:113). Informan yang menjadi sumber data penulisan terdiri dari 10 orang yakni Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, Kepala Bidang Pelindungan Jaminan Sosial Kabupaten Barito Utara, Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Barito Utara, Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Barito Utara dan 5 orang sebagai Perwakilan Keluarga Penerima PKH atau yang disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan teori implementasi dari Mazzmanian dan Sabathier yang menyatakan bahwa implementasi dianalisis dengan 3 dimensi, yaitu Mudah-Tidaknya Masalah Dikendalikan, Kemampuan Kebijakan untuk menstruktur Proses Implementasi dan Variabel Diluar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Mudah-Tidaknya Masalah Dikendalikan**

Penulis menganalisis dimensi Mudah-Tidaknya Masalah Dikendalikan dengan 3 indikator yaitu Dukungan Teori dan Teknologi, Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran dan Tingkat Perubahan Perilaku yang Dikehendaki.

Ketersediaan dukungan dari teori dan teknologi adalah penting dalam menjalankan kebijakan publik. Dukungan Teori mengacu pada kekuatan dasar kebijakan yang berdasarkan pada pengetahuan ilmiah yang teruji dan diakui. Teknologi yang memadai memungkinkan pengumpulan data yang lebih baik, pemantauan yang lebih akurat, dan penyebaran solusi yang lebih cepat. Landasan ilmiah yang kokoh memastikan bahwa kebijakan tersebut didesain dengan mempertimbangkan masalah secara mendalam dan menyediakan solusi yang tepat. Melalui wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulis memperoleh informasi bahwa dukungan teori dan teknologi sudah diterapkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Utara khususnya dalam elemen yang bertugas menangani pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Keragaman perilaku dalam kelompok sasaran merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik. Fenomena ini mencerminkan bahwa di dalam suatu kelompok, baik individu maupun subkelompok, memiliki variasi perilaku yang signifikan. Pendekatan yang lebih kompleks diperlukan untuk mengatasi keragaman dalam kelompok, mempertimbangkan berbagai faktor seperti konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan Masyarakat dan Desa, penulis memperoleh informasi bahwa Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran sudah dipertimbangkan dan diolah oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Utara khususnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan agar berjalan lebih tepat sasaran dan berjalan dengan efektif.

Menargetkan perubahan perilaku yang spesifik dan dapat diukur, pembuat kebijakan dapat merancang intervensi yang lebih tepat dan menyediakan indikator yang jelas untuk mengevaluasi keberhasilan. Kebijakan yang realistis dalam menetapkan target perubahan perilaku cenderung mendapatkan dukungan lebih luas dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Melalui wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulis memperoleh informasi bahwa Tingkat Perubahan yang dikehendaki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sama dengan tujuan dari Kementrian Sosial itu sendiri, yaitu mengurangi jumlah masyarakat miskin dan membantu mereka mandiri dengan adanya bantuan dari Program Keluarga harapan.

### **3.2. Kemampuan Kebijakan untuk menstruktur Proses Implementasi**

Konsep kedua dalam teori implementasi kebijakan publik oleh Mazmanian dan Sabatier, yaitu Kemampuan Kebijakan untuk Mengatur Proses Implementasi, menekankan pentingnya struktur yang terencana dengan baik dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Penulis melakukan analisis dengan menggunakan 7 indikator yaitu Kejelasan dan Konsistensi, Dipergunakannya Teori Kausal, Ketetapan Alokasi Sumberdana, Keterpaduan Hirarki antarlembaga Pelaksana, Aturan Pelaksanaan dari Lembaga Pelaksana, Perekrutan Pejabat Pelaksana dan Keterbukaan Kepada pihak luar.

Prinsip Kejelasan dan Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan publik menyoroti pentingnya memiliki tujuan yang jelas serta prosedur yang seragam di setiap tahap implementasi kebijakan. Melalui wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulis memperoleh informasi bahwa konsistensi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan berjalan dengan lancar, pelaksana Program Keluarga Harapan yang di Tangani oleh Bidang Penanganan Fakir Miskin secara rutin setiap bulannya melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat.

Teori Kausal adalah dasar yang vital dalam merancang kebijakan publik. Penggunaannya bergantung pada pemahaman yang tepat tentang bagaimana suatu kebijakan diharapkan menciptakan perubahan yang diinginkan. Melalui wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulis memperoleh informasi bahwa penggunaan teori kausal menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya semaksimal mungkin menjadikan Program Keluarga Harapan tidak hanya sebagai bentuk membantu masyarakat mendapatkan bantuan finansial yang berkelanjutan.

Penetapan alokasi sumberdana memang merupakan indikator kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya yang cukup, termasuk pendanaan, personel, dan teknologi, mustahil bagi kebijakan untuk diimplementasikan dengan sukses. Melalui wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulis memperoleh informasi bahwa alokasi sumberdana bersumber dari kementerian sosial dan langsung disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan.

Keterpaduan hirarki antarlembaga pelaksana adalah konsep yang menekankan pentingnya koordinasi yang baik dan kerjasama antara berbagai lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Melalui wawancara Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulis memperoleh informasi bahwa hirarki antar lembaga pelaksana berjalan dengan baik, dan sesuai dengan sistematika yang ada. Mulai dari Pendamping yang melekat pada Keluarga Penerima Manfaat di tingkat Desa, lalu di koordinir Oleh Kabupaten yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hingga Kementerian Sosial.

Aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana adalah elemen krusial dalam proses implementasi kebijakan. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman yang mengatur langkah-langkah, prosedur, dan standar yang harus diikuti dalam menjalankan kebijakan. Melalui wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulis memperoleh informasi bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan sepenuhnya Aturan Pelaksanaan dari Lembaga Pelaksana dalam hal ini Kementerian Sosial.

Perekrutan pejabat pelaksana adalah langkah krusial dalam proses implementasi kebijakan. Memilih individu yang tepat untuk mengelola dan menjalankan kebijakan berarti mencari orang-orang yang tidak hanya memiliki kualifikasi dan pengalaman yang relevan, tetapi juga dedikasi dan komitmen terhadap tujuan kebijakan tersebut. Melalui wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulis memperoleh informasi bahwa Perekrutan Pejabat Pelaksana atau Pelaksana Program Keluarga Harapan sepenuhnya berasal dari Kementerian Sosial yang dijaring dari Masyarakat setempat yang kompeten untuk membantu dan mendampingi Keluarga Penerima Manfaat.

Keterbukaan kepada pihak luar merupakan indikator penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk memahami kebijakan yang sedang dijalankan, termasuk tujuan, metode, dan hasil yang diharapkan. Melalui wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulis memperoleh informasi bahwa Keterbukaan kepada pihak luar sangat dibuka seluas luasnya oleh komponen pelaksana Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

### **3.3. Variabel Diluar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses**

Dimensi ketiga dari teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier berfokus pada Variabel Diluar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses. Variabel-variabel ini merupakan faktor-faktor eksternal yang tidak selalu dapat dikontrol

oleh pembuat kebijakan, tetapi memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil dari implementasi kebijakan tersebut. Penulis menganalisis menggunakan 4 indikator yaitu Kondisi Sosio-Ekonomi dan Teknologi, Dukungan Publik, Sikap dan Sumber-sumber yang dimiliki Kelompok Masyarakat dan Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana.

Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi memainkan peran penting dalam penerimaan dan implementasi kebijakan. Tingkat pendapatan masyarakat dapat menentukan seberapa jauh mereka mampu menanggung biaya yang mungkin timbul akibat kebijakan baru. Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulis memperoleh informasi bahwa kondisi sosio-ekonomi masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan PKH khususnya pada teknologi, karena keluarga penerima manfaat tidak semua memiliki akses tersebut khususnya dalam mempermudah komunikasi kepada Pendamping PKH yang melekat di Kabupaten Barito Utara.

Dukungan dari masyarakat adalah faktor utama dalam kesuksesan penerapan kebijakan. Kebijakan yang didukung secara luas oleh masyarakat memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk berhasil karena terdapat kesepakatan sosial yang kuat. Untuk membangun dukungan ini, pendidikan kepada masyarakat mengenai manfaat dan relevansi kebijakan tersebut menjadi penting. Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulis memperoleh informasi bahwa dukungan publik khususnya laporan dari masyarakat sekitar sangat mendukung pelaksanaan PKH di Kabupaten Barito Utara agar Keluarga Penerima Manfaat PKH ditetapkan secara adil, jika sudah mampu maka di stop dan apabila ada yang belum terdata dan diajukan menerima bantuan.

Indikator ketiga yang dimaksud adalah Sikap dan Sumber Daya Kelompok Masyarakat. Sikap positif dari kelompok masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap positif ini mencerminkan kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dan beradaptasi dengan perubahan yang diusulkan oleh kebijakan. Melalui wawancara Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulis memperoleh informasi bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan sumber yang tersedia agar menciptakan ekonomi yang mandiri seperti usaha mikro, pertanian dan sebagainya.

Pejabat pelaksana dengan kemampuan kepemimpinan yang kuat mampu menginspirasi dan memobilisasi semua pihak untuk mendukung kebijakan. Kesepakatan yang tercipta antara keberhasilan implementasi. berbagai pemangku kepentingan ini memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan cara kerja kebijakan tersebut, sehingga meningkatkan peluang. Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulis memperoleh informasi bahwa Kemampuan dan membaca kesempatan dari kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan dilapangan sudah sangat baik mengingat evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan setiap bulan kepada Keluarag Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan proses pembaruan data untuk mengklasifikasikan penerima program yang tidak memenuhi syarat. Dalam kasus ini, pendamping program akan mengambil tindakan berupa negosiasi dan mengeluarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH dengan menggunakan surat pengunduran diri. Tujuannya adalah untuk mencegah bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan kepada penerima yang tidak memenuhi syarat (Mohani, dll:2020:64). Program PKH memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Selain itu, program PKH juga melibatkan pemutakhiran data secara berkala. Pemutakhiran data ini bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran program sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Layaknya program lainnya, Implementasi Program Keluarga Harapan ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah pengalokasian dana yang kurang efisien oleh beberapa peserta, sehingga membuat program ini kurang efektif, tidak memberikan manfaat yang diharapkan, dan tidak sesuai dengan maksud awalnya (Kariawati 2017). Inkonsistensi dalam mencapai sasaran program, di mana keluarga yang relatif lebih mapan menerima manfaat dari program ini, sementara keluarga yang sangat miskin tidak mendapatkan akses yang memadai (Ulfah 2015). Selanjutnya karakteristik dari program ini yakni program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat keapda daerah melalui Permensos Nomer 1 Tahun 2018, alokasi anggaran dan dukungan sepenuhnya dari Kementerian Sosial. Program Keluarga Harapan juga diimplementasikan sesuai dengan Permensos Nomer 1 tahun 2018 dari tahap pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat sampai tahap graduasi. Program Keluarga Harapan juga berdampak positif pada masyarakat.

Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu membantu kondisi ekonomi dan Kesehatan Masyarakat miskin, meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara masif, sehingga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat secara tidak langsung layaknya penelitian Yasin yang menemukan Program Keluarga Harapan berdampak positif pada masyarakat. (Yasin, 2021).

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan dengan cukup baik dikarenakan hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi-dimensi seperti Kemampuan Kebijakan untuk menstruktur Proses Implementasi, Mudah-Tidaknya Masalah Dikendalikan, Variabel Diluar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat proses implementasi kebijakan tersebut. Selain Faktor pendukung Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dukungan publik membantu pelaksana Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan kepada Keluarga Penerima Manfaat dan Koordinasi dari pusat hingga ke daerah berjalan secara linier, artinya dalam menjalankan Program Keluarga Harapan semua prosedural dan teknis terlaksana dengan baik sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomer 1 Tahun 2018. Sedangkan faktor penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yaitu setiap desa di Kabupaten Barito Utara Kurangnya jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan dan Keluarga Penerima Manfaat tidak menunjukkan peningkatan pendapatan untuk keluar dari status Kemiskinan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan dengan informan yang terbatas.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. In CV. Alfabeta.
- Al Arif, M. N. R. (2012). Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), 17-29. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/viewFile/1649/1386>
- Badan Pusat Statistik. (2022) *Statistik Kabupaten Barito Utara 2023*.
- Gopal, P. S., Rahman, M. A. A., Malek, N. M., Singh, P. S. J., & Hong, L. C. (2021). Kemiskinan adalah satu fenomena multidimensi: suatu pemerhatian awal. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(1), 40-51. <https://www.msocsciences.com/index.php/mjssh/article/download/608/451>
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Ghalia Indonesia.

- Kurniawan, O., Kusbandrijo, B., & Puspaningtyas, A. (2023). *EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA GOLO MENI, KECAMATAN KOTA KOMBA UTARA, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR*. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 3(06), 140-152.  
<https://www.aksiologi.org/index.php/praja/article/download/1060/726>
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy studies journal*, 8(4), 538-560.  
[https://www.academia.edu/download/76819020/THE\\_IMPLEMENTATION\\_OF\\_PUBLIC\\_POLICY\\_A\\_FR.pdf](https://www.academia.edu/download/76819020/THE_IMPLEMENTATION_OF_PUBLIC_POLICY_A_FR.pdf)
- Mohani, Cucu Suhery, U. R. (2020). *Implementasi Metode Promethee Dalam Menentukan Calon Penerima Bantuan Pkh Berbasis Web (Studi Kasus: Desa Tengguli Kecamatan Sajad)*. *Jurnal Komputer Dan Aplikasi*, 08(02), 43-54.  
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcskommipa/article/viewFile/41496/75676586339>
- Ulfah, S. M., & Ratnasari, P. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 4(1), 1-12.  
<https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/download/380/1919>
- Rusmiyati, C. (2018). Dampak Program Keluarga Harapan Bagi Peningkatan Prestasi Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 42(3), 225-234.  
<http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/download/2229/1082>
- Salasiah, S. (2023). *Penerapan Program Keluarga Harapan Dan Dilematika Bagi Pengentasan Kemiskinan Dikelurahan Teluk Nilau (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)*.  
<https://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/515/1/SALASIAH%20501180116%20PENERAPAN%20PROGRAM%20KELUARGA%20HARAPAN%20DAN%20DILEMATIKA%20BAGI%20PENGENTASAN%20KEMISKINAN%20DIKELURAHAN%20TELUK%20NILAU%20-%20Siyah%20Siyah.pdf>
- Sari, T. R. (2022). *Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Tiumang Kec. Tiumang Kab. Dharmasraya)*.  
[https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/25489/1652949736873\\_Skripsiii%20Tina%20regina%20Sari%20yang%20asli%20batua-dikonversi\\_compressed.pdf?sequence=1](https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/25489/1652949736873_Skripsiii%20Tina%20regina%20Sari%20yang%20asli%20batua-dikonversi_compressed.pdf?sequence=1)
- Sudarwati, N. (2020). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. *Lecturer Repository*.  
<https://repository.stkipjb.ac.id/index.php/lecturer/article/download/498/413>
- Sulkarnain, S., Arwin, A., & Fitriawaty, F. (2021). Program Keluarga Harapan dalam Mendukung Taraf Hidup Masyarakat: Kajian Implementasi di Parepare. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2).  
<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/viewFile/1807/1602>
- Ulfah, S. M., & Ratnasari, P. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 4(1), 1-12. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/download/380/1919>
- Yasin, R. (2021). *Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia))*.  
<https://eprints.uinsaizu.ac.id/10330/2/ROQI%20YASIN%20KEBIJAKAN%20PROGRAM%20KELUARGA%20HARAPAN%20%28PKH%29%20DALAM%20PENGENTASAN%20KEMISKINAN%20DI%20KABUPATEN%20BANYUMAS.pdf>